

PANDEMI COVID-19 DAN REALISASI REALOKASI DAN *REFOCUSING* ANGGARAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR

Tiara Juniar Soewardi¹, Risqi Noor Hidayati Putri², Intan Putri Rizqi³

¹Jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, UPN “Veteran” Yogyakarta

^{2,3} Jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya

tiara.juniar@upnyk.ac.id

ABSTRAK

Pemanfaatan anggaran untuk belanja pemerintah harus dilakukan berdasarkan prinsip *value for money* untuk merealisasikan semua rencana strategis pembangunannya. Namun, pada kondisi tertentu yang mendesak seperti terjadi bencana atau krisis mengharuskan pemerintah untuk melakukan perubahan anggaran. Adanya pandemi Covid-19 kemudian memerlukan *reallocating dan refocusing* sebagai stimulus fiskal dan penanggulangan pandemi. Penelitian ini bertujuan untuk melihat apakah pemerintah telah memanfaatkan anggarannya dengan baik dan berhasil melakukan realokasi dan *refocusing* anggaran sebagai upaya mitigasi. Dengan menggunakan analisis kuantitatif deskriptif untuk menganalisis terkait dampak belanja tidak terduga (BTT) terhadap capaian indikator kinerja utama dan analisis SWOT untuk mengidentifikasi permasalahan dari implementasi kebijakan realokasi dan *refocusing* anggaran serta menyusun rekomendasi kebijakan untuk mempercepat pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19. Hasil dari penelitian ini adalah penggunaan anggaran BTT telah diarahkan untuk tetap menjaga target capaian IKU dan pada tahun 2021 diperkirakan pertumbuhannya akan meningkat (skenario moderat/optimis). Selain itu, permasalahan yang muncul atas implementasi kebijakan alokasi anggaran penanganan pandemi Covid-19 adalah penurunan APBD dan *refocusing* anggaran dalam rangka penanganan masalah kesehatan, pemulihan ekonomi, dan penyediaan jaring pengaman sosial. Penelitian ini telah memberikan berbagai rekomendasi kebijakan bagi pemerintah daerah baik dari sisi anggaran, kesehatan, ekonomi, dan sosial dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi pasca pandemi.

Kata Kunci : Evaluasi Anggaran, Pandemi Covid-19, Realokasi Anggaran, Refocusing Anggaran

ABSTRACT

Budget utilization for government spending must be carried out based on the principle of value for money to objectify all strategic development plans. However, in certain urgent conditions like disaster or crises, the government have to reallocating and refocusing or changes the budget to handling and as a fiscal stimulus cause of Covid-19. Therefore, this study aims to see whether the government has properly utilized its and has succeeded in reallocating and refocusing the budget as a countermeasure effort, it is as a mitigation effort. This study uses a descriptive quantitative analysis of the 2020 APBD of local government to analyze the impact of unexpected spending (BTT) on the achievement of key performance indicators (IKU) and SWOT analysis to identify problems with the implementation of budget reallocation and refocusing policies and formulate policy recommendations. The results of this study are that the use of the BTT budget has been directed to maintain the IKU achievement targets and estimated that growth will increase in moderate and optimistic scenarios in 2021. The problems that have arisen in the implementation of the budget allocation policy for handling the Covid-19 pandemic are reducing and refocusing the regional budget in the context of handling health problems, economic recovery, and providing social safety nets. This research has provided various policy recommendations for local governments on the budget, health, economic and social sides in the context of accelerating post-pandemic economic recovery.

Keywords : Budget Evaluation, Covid-19, Regional Development, Policy Recommendation.

1. PENDAHULUAN

Pandemi Covid-19 yang terjadi sejak tahun 2019 lalu berdampak pada seluruh sendi-sendi negara baik kesehatan, sosial, bahkan perekonomian. Hingga bulan Desember 2020, tercatat sebanyak 735.124 kasus terkonfirmasi positif di Indonesia, artinya sekitar 0,27 persen penduduk Indonesia terkena Covid-19. Provinsi Jawa Timur menjadi satu dari tiga puluh tiga provinsi berada diposisi tertinggi kedua setelah DKI Jakarta untuk sebaran kasus Covid-19. Sebanyak 84.152 orang atau 16,4% penduduk Jawa Timur terkonfirmasi positif. Selain itu, Provinsi Jawa Timur juga menempati kasus kematian tertinggi dengan jumlah 5.827 orang.

Dampak yang semakin meluas hingga sektor sosial ekonomi seperti penurunan pendapatan yang signifikan, peningkatan pengangguran, dan gangguan dalam industri transportasi, jasa, dan manufaktur (Pak, dkk. 2020) membutuhkan upaya penanganan bersama baik di level pemerintah pusat maupun daerah melalui realokasi dan *refocusing* anggaran.

Realokasi dan *refocusing* anggaran Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk penanganan Covid-19 ialah sebesar 2,3 Triliun, atau setara dengan 6,8 persen anggaran APBD Jatim 2020. Realokasi dan *refocusing* anggaran memiliki hambatan dari sisi penurunan PAD yang ekstrim sebagai dampak dari menurunnya aktivitas ekonomi masyarakat.

Reformasi pengelolaan keuangan daerah diawali dengan adanya tuntutan terwujudnya pemerintahan yang baik (*good governance*). Didukung dengan hasil empiris, kebijakan fiskal lebih efisien ketika lembaga-lembaga memiliki kualitas yang baik (Sabil dan Qamar, 2019). Guna mewujudkan pemerintahan yang baik, diperlukan reformasi kelembagaan dan reformasi manajemen sektor publik. Reformasi manajemen sektor publik memerlukan adanya reformasi di bidang pengelolaan keuangan daerah (Mardiasmo, 2002).

Melalui Perppu Nomor 01 Tahun 2020 dan Perpres Nomor 54 Tahun 2020, penetapan kebijakan transfer ke daerah diarahkan untuk penanganan dan pencegahan Covid-19 yang antara lain dilakukan dengan merealokasi anggaran untuk penanganan kesehatan, penanganan dampak ekonomi dan penyediaan jaring pengaman sosial. Untuk mencapai

kapasitas fiskal dan kemandirian daerah yang tinggi, tentunya perlu partisipasi dari seluruh pemangku kebijakan untuk menyusun anggaran yang berbasiskan prioritas pembangunan daerah. Dengan alokasi anggaran yang sesuai dengan isu strategis dan prioritas pembangunan nantinya akan membantu daerah dalam mencapai target-target pembangunan dengan tingkat akselerasi yang lebih tinggi.

Berdasarkan kebutuhan pengelolaan keuangan yang berkualitas untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan di Provinsi Jawa Timur serta ketidakpastian ekonomi akibat kondisi pandemi, maka dibutuhkan analisis evaluasi keuangan yang dapat menggambarkan kemampuan pengelolaan anggaran yang selama ini telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada periode 2020, yaitu terhitung sejak Januari sampai dengan September 2020.

Menurut Sirkhosana dan Nezwi (2019), evaluasi anggaran merupakan tahap akhir dari siklus anggaran, yang berfokus pada penelitian yang cermat tentang bagaimana anggaran telah berkembang dalam memberikan keluaran yang diharapkan. Analisis kemampuan keuangan daerah yang dilakukan tentunya tidak hanya mengilustrasikan kemampuan keuangan daerah Provinsi Jawa Timur saja, akan tetapi juga mengevaluasi permasalahan-permasalahan yang ada dalam pengelolaan anggaran di masa pandemi dan memberikan solusi agar pengelolaan keuangan pemerintah Provinsi Jawa Timur lebih baik ke depannya.

Berdasarkan uraian latarbelakang dan tinjauan literatur diatas, tujuan dalam kajian ini ialah:

1. Menganalisis dampak Belanja Tidak Terduga penanganan Covid-19 terhadap capaian target indikator kinerja utama Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
2. Menganalisis permasalahan implementasi kebijakan alokasi anggaran penanganan pandemi Covid-19 pemerintah Provinsi Jawa Timur;
3. Menyusun rekomendasi kebijakan perencanaan anggaran untuk percepatan pemulihan ekonomi Jawa Timur akibat pandemi Covid-19.

2. METODE

Terdapat beberapa tahap analisis yang digunakan dalam kajian ini. Tahapan ini

merupakan penilaian terhadap berbagai keadaan yang dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip pendekatan dan metode serta teknis analisis studi yang dapat dipertanggungjawabkan baik secara ilmiah maupun secara praktis.

Analisis deskriptif kuantitatif dipakai untuk mengetahui dampak Belanja Tidak Terduga penanganan Covid-19 terhadap capaian target indikator kinerja utama Pemerintah Provinsi Jawa Timur; Analisis identifikasi permasalahan implementasi kebijakan alokasi anggaran penanganan pandemi Covid-19 pemerintah Provinsi Jawa Timur; dan Analisa perumusan strategis dan rekomendasi kebijakan perencanaan anggaran untuk percepatan pemulihan ekonomi Jawa Timur akibat pandemi Covid-19.

Untuk memetakan permasalahan implementasi anggaran pembangunan, maka dilakukan Analisa data dengan menggunakan metode Analisa SWOT. Analisis SWOT digunakan untuk mengetahui kondisi fisik/tata ruang, ekonomi dan sosial wilayah perencanaan serta kelembagaan sehingga dihasilkan potensi dan masalah yang terkait, yang dipergunakan untuk menentukan arah pengembangan tata ruang kota. Analisis SWOT adalah analisis untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan kondisi kawasan yaitu untuk melihat *strength* (kekuatan), *weakness* (kelemahan), *opportunity* (peluang) dan *threat* (ancaman) serta menginventarisasi faktor-faktor tersebut dalam strategi perencanaan yang dipakai sebagai dasar untuk menentukan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan dalam pengembangan selanjutnya. Hasil analisa faktor tersebut dapat dibagi menjadi dua aspek yaitu aspek positif (*strength* dan *opportunity*) dan negatif (*weakness* dan *threat*), yang dapat berpengaruh terhadap rencana yang akan dijalankan.

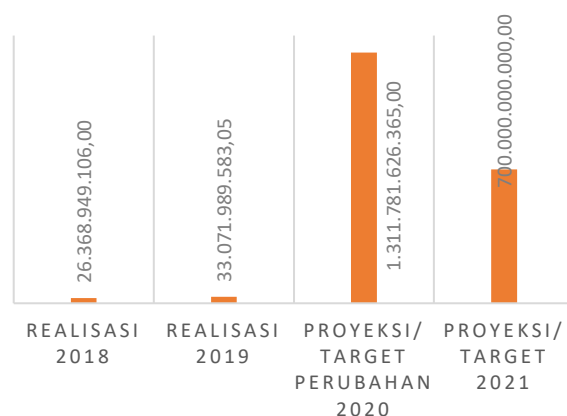
Matriks SWOT dipakai untuk menyusun faktor-faktor strategis yang menggambarkan bagaimana peluang dan ancaman eksternal yang dihadapi dan dapat disesuaikan dengan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui strategi dasar pemecahan masalah yang dapat diterapkan secara kualitatif. Analisa matriks ini menghasilkan 4 (empat) set kemungkinan alternatif strategi yaitu:

- SO yaitu strategi/ alternatif pemecahan masalah dengan memanfaatkan kekuatan (S) secara maksimal untuk meraih peluang (O).
- ST yaitu strategi/ alternatif pemecahan masalah dengan memanfaatkan kekuatan (S) secara maksimal untuk mengantisipasi ancaman (T) dan berusaha menjadikan maksimal menjadi peluang (O).
- WO yaitu strategi/ alternatif pemecahan masalah dengan meminimalkan kelemahan (W) untuk meraih peluang (O).
- WT yaitu strategi/ alternatif pemecahan masalah dengan meminimalkan kelemahan (W) untuk menghindari secara lebih baik dari ancaman (T).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisa Dampak BTT Penanganan Covid-19 terhadap Capaian Pembangunan

Dalam rangka pelaksanaan kebijakan di bidang keuangan daerah, terjadi perubahan pengeluaran anggaran belanja Provinsi Jawa Timur, khususnya pada pos belanja tidak terduga (BTT). Berdasarkan tujuan pengeluaran daerah dalam belanja tidak terduga dapat dilakukan dalam bentuk program dan kegiatan yang menargetkan penyelesaian keadaan darurat, termasuk dalam mengatasi pandemi Covid-19 yang saat ini terjadi. Realisasi BTT Provinsi Jawa—

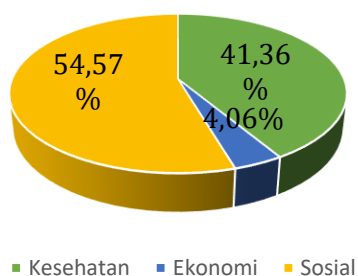


Gambar 1. Realisasi dan Proyeksi/Target Belanja Tidak Terduga Provinsi Jawa Timur, 2019-2021

Timur mengalami peningkatan signifikan dari tahun 2019 ke 2020. Tampak jelas arah kebijakan dalam menangani Covid-19 adalah menggeser penggunaan anggaran belanja dengan tujuan utama pencegahan penularan Covid-19 yang semakin luas.

Anggaran belanja BTT Provinsi Jawa Timur tahun 2020 sebesar Rp 1.380.587.842.305,87. Sampai dengan 12 Oktober 2020, realisasi BTT telah mencapai 76% dari anggaran yaitu sebesar Rp 1.043.825.466.250 untuk penanganan kesehatan, ekonomi dan sosial. Untuk penanganan kesehatan, realisasi mencapai Rp 431.765.046.250 sekitar 31 persen dari total anggaran yang disediakan. Penanganan dalam bidang kesehatan meliputi pengadaan bahan medis, obat-obatan, & APD; insentif tenaga kesehatan; perbaikan ruang isolasi; penyediaan rumah observasi; bantuan tunai ke Kabupaten/Kota; penanganan di UPT Dishub, bandara, stasiun & terminal; dan lain-lain.

Untuk penanganan ekonomi, realisasi mencapai Rp 42.399.000.000 sekitar 3 persen dari total anggaran yang disediakan. Penanganan dalam bidang ekonomi meliputi hibah sembako; bantuan pupuk; operasi pasar; stimulus untuk pekerja desa wisata; stabilisasi pasokan dan harga; *cash for work* untuk pesantren dan usaha mikro; dan lain-lain. Sedangkan untuk penanganan sosial, realisasi mencapai Rp 569.661.400.000 sekitar 41 persen dari total anggaran yang disediakan. Penanganan dalam bidang sosial meliputi bantuan tunai bagi pekerja terdampak; penanganan TKI bermasalah terdampak; penanganan penyelesaian PHK pekerja terdampak; bantuan sosial untuk keluarga miskin; dan lain-lain.



Gambar 2. Realisasi Belanja Tidak Terduga Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 (s.d. 12 Oktober 2020)

Peningkatan BTT yang cukup signifikan khususnya dalam penanganan Covid-19 pada bidang kesehatan, ekonomi, dan sosial cukup berdampak pada pergeseran IKU. BTT diarahkan pada kegiatan yang sangat terkait dengan IKU. Selain fokus pada permasalahan

kesehatan, penggunaan anggaran BTT diarahkan untuk tetap menjaga target capaian IKU agar tidak terjadi perubahan (naik/turun) secara signifikan. Beberapa kegiatan seperti hibah sembako pada pekerja informal, *cash transfer* bagi pekerja ataupun pekerja ter-PHK, bantuan sosial keluarga miskin, dan lainnya dapat menekan agar capaian IKU tetap terjaga.

Analisa Permasalahan Implementasi Kebijakan Alokasi Anggaran Penanganan Covid-19

Berbagai langkah komprehensif dilakukan oleh Jawa Timur dalam menangani Covid-19 yang terfokus pada tiga bidang penanganan, yaitu kesehatan, ekonomi, dan sosial. Untuk mencegah penyebaran dan penularan Covid-19 serta dampaknya menyebar luas ke masyarakat, Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui instruksi aturan Pemerintah Pusat membuat serangkaian kebijakan untuk penanganan Covid-19.

Terlihat pada table 1. bahwa wabah Covid-19 berdampak jelas pada pengelolaan keuangan Provinsi Jawa Timur, antara lain: Dari sisi internal PAD mengalami penurunan sebagai akibat dari penurunan kinerja pada sektor ekonomi, khususnya terhadap jenis pajak yang terkait dengan Wabah Covid-19 berdampak jelas pada pengelolaan keuangan Provinsi Jawa Timur.

Pertama, dari sisi internal PAD mengalami penurunan sebagai akibat dari penurunan kinerja pada sektor ekonomi, khususnya terhadap jenis pajak yang terkait dengan mobilitas dan konsumsi penduduk, seperti pajak hotel dan pajak restoran. Sementara itu, dari sisi eksternal terdapat perubahan pada penerimaan dana transfer sebagai akibat penyesuaian pendapatan negara karena adanya kebijakan insentif perpajakan.

Kedua, *refocusing* kegiatan dan realokasi anggaran menggeser perencanaan dan penganggaran yang telah ditetapkan sebelumnya berubah sebagian, sehingga konsekuensinya terdapat penyesuaian pada APBD tahun 2020 yang lebih diarahkan pada pencapaian efisiensi belanja program/ kegiatan khususnya dalam percepatan penanganan Covid-19. Ketiga, konsekuensi lanjutan realokasi anggaran di Provinsi Jawa Timur adalah meningkatnya penggunaan Belanja

Tidak Terduga (BTT) yang fokus pada penanganan bidang kesehatan (2,69 persen), pemulihan ekonomi (0,77 persen) dan jaring pengaman sosial (3,33 persen), yang ditekankan pada tiga aspek yaitu rasionalisasi belanja pegawai; rasionalisasi belanja barang & jasa; dan rasionalisasi belanja barang modal (Kemendagri, 2020).

Dalam bidang kesehatan, implementasi kebijakan alokasi anggaran penanganan Covid-19 berdampak pada penanganan covid-19 yang lebih komprehensif melalui berbagai jalur. Mengingat di Jawa Timur per 1 Desember 2020, tercatat sebanyak 62.313 kasus terinfeksi positif atau sebesar 11,2 persen dari total kasus terinfeksi skala nasional dan menempatkan Jawa Timur sebagai daerah kedua terbanyak terinfeksi setelah DKI Jakarta (24,7 persen). Penanganan bidang kesehatan diarahkan pada penyediaan Sumber Daya Manusia (SDM) kesehatan, infrastruktur kesehatan, sistem kesehatan, dan bantuan kesehatan menjadi lebih optimal dalam upaya percepatan penanganan dan pendeteksian virus yang lebih baik.

Dalam bidang ekonomi, implementasi kebijakan alokasi anggaran penanganan Covid-19 berdampak pada usaha pemulihan ekonomi yang terarah yang bertujuan untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha selama pandemi Covid-19. Melalui APBD-Perubahan 2020, intervensi kebijakan yang dilakukan dalam bidang ekonomi pada sektor yang mengalami *potential losers* akibat pandemi Covid-19 yaitu terfokus pada penyelamatan pariwisata dan UKM; penyediaan lapangan kerja dan industrialisasi; serta menjaga ketahanan pangan. Kebijakan pemulihan ekonomi pasca Covid-19 di Provinsi Jawa Timur menggunakan skema penganggaran yang bersumber dari APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota; BUMN/D; Perbankan, Pemerintah Pusat melalui Kementerian/Lembaga; Dana Desa; swasta dan masyarakat. Kerjasama yang baik dengan berbagai pihak diharapkan dapat secara cepat mengatasi masalah perekonomian yang muncul akibat dari pandemi Covid-19.

Pandemi Covid-19 berdampak pada penyelenggaraan kesejahteraan sosial masyarakat seiring dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang

Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Dalam bidang sosial, implementasi kebijakan alokasi anggaran penanganan Covid-19 berdampak pada pelaksanaan kegiatan yang diarahkan dalam upaya perlindungan sosial yang lebih terintegratif dan bertahap, seperti pelaksanaan berbagai kegiatan dalam rangka *Promotive* dan *Preventif* melalui Jaring Pengaman Sosial/JPS (*Social Safety Net*) seperti bantuan sosial kepada masyarakat terdampak. Bantuan sosial yang digulirkan kepada masyarakat terdampak dapat menekan angka kemiskinan. Tingkat kemiskinan yang diproyeksikan tetap akan mengalami penurunan sebesar 0.2 persen di bawah capaian tahun 2019 dan tingkat pengangguran yang tetap terjaga bahkan target capaian pada tahun 2020 diturunkan sebesar 0.1 persen. Sementara itu, pandemi Covid-19 juga berdampak pada peningkatan kepedulian sosial yang tercermin pada meningkatnya filantropi, sehingga Indeks Kesalehan Sosial (IKS) meningkat.

Dalam kaitannya dengan indikator kinerja, adanya pandemi Covid-19 berdampak pada perubahan target capaian yang telah direncanakan sebelumnya. Pandemi Covid-19 berdampak pada perubahan target Indikator Kinerja Utama (IKU) dan indikator kinerja lainnya berdasarkan urusan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 dan RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2020. Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, terjadi pergeseran atau perubahan pada sisi pendapatan maupun belanja daerah akibat dari kebijakan atau langkah yang diambil dalam mengatasi pandemi Covid-19 sehingga dampak lanjutan pada target-target kinerja yang juga berubah dalam penyesuaian.

Dalam kaitannya dengan indikator kinerja, adanya pandemi Covid-19 berdampak pada perubahan target capaian yang telah direncanakan sebelumnya. Pandemi Covid-19 berdampak pada perubahan target Indikator Kinerja Utama (IKU) dan indikator kinerja lainnya berdasarkan urusan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 dan RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2020. Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, terjadi pergeseran atau perubahan pada sisi pendapatan maupun belanja daerah akibat dari kebijakan atau langkah yang diambil dalam mengatasi pandemi Covid-19

sehingga dampak lanjutan pada target-target kinerja yang juga berubah dalam penyesuaian.

Berdasarkan hasil matriks strategi dan kebijakan perencanaan anggaran untuk penanganan dan pemulihan Covid-19, maka terdapat beberapa strategi dalam upaya implementasi kebijakan alokasi anggaran dan percepatan pemulihan Covid-19 di Provinsi Jawa Timur, khususnya dalam pelaksanaan pemulihan ekonomi dalam jangka menengah dan panjang melalui anggaran tahun 2021. Hal ini dimaksudkan sebagai perbaikan kedepan bagi perencanaan dan pengelolaan anggaran pembangunan Provinsi Jawa Timur. Rekomendasi tersebut disusun berdasarkan empat aspek penting dalam penanganan dampak pandemi Covid-19, yaitu program penanganan Kesehatan, program pemulihan ekonomi daerah, dan program jaring pengaman sosial serta aspek pengelolaan keuangan/anggaran yang menjadi fokus kajian ini. Adapun rincian strategi, arah kebijakan, rekomendasi kegiatan yang dapat dilaksanakan, indikator kinerja, serta OPD yang bertanggung jawab untuk masing-masing permasalahan yang terjadi dalam keempat aspek tersebut dijabarkan pada table 2.

4. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa dampak pandemi Covid-19 terhadap kondisi pengelolaan anggaran, kesehatan, ekonomi dan sosial di Provinsi Jawa Timur, terdapat dua kesimpulan. Pertama, penggunaan anggaran BTT diarahkan untuk tetap menjaga target capaian IKU agar tidak terjadi perubahan (naik/turun) secara signifikan. Pencapaian IKU tahun 2020 telah disesuaikan dengan adanya pandemi Covid-19 dan pada tahun 2021 diperkirakan pertumbuhannya akan meningkat (skenario moderat/optimis).

Kedua, permasalahan yang muncul atas implementasi kebijakan alokasi anggaran penanganan pandemi Covid-19 adalah penurunan APBD dan *refocusing* anggaran dalam rangka penanganan masalah kesehatan, pemulihan ekonomi, dan penyediaan jaring pengaman sosial. Namun dalam implementasinya, masih terdapat permasalahan yang muncul antara lain meningkatnya kasus positif karena kedisiplinan masyarakat yang masih rendah; perlambatan pertumbuhan

ekonomi; ketimpangan, pengangguran, dan kemiskinan meningkat; konektivitas dan integrasi dalam pembatasan sosial masih rendah; dan munculnya disorganisasi dan disfungsi sosial yang berdampak pada diskriminasi dan kekerasan simbolik.

Rekomendasi Kebijakan

Berdasarkan matriks strategi dan kebijakan perencanaan anggaran untuk penanganan dan pemulihan Covid-19, maka beberapa rekomendasi yang dapat dilakukan dalam upaya implementasi kebijakan alokasi anggaran dan percepatan pemulihan Covid-19 di Provinsi Jawa Timur antara lain sebagai berikut:

A. Bidang Anggaran

- Pemanfaatan media *elektronifikasi* dan *digitalisasi* dalam layanan berbasis *e-government* (layanan pemungutan PAD).
- *Better spending* pada belanja produktif seperti belanja pembangunan, dalam rangka optimalisasi penggunaan anggaran untuk kesehatan, ekonomi, dan sosial.
- Optimalisasi sumber pendanaan (*Creative Financing*) dalam rangka peningkatan layanan kesehatan, pemulihan ekonomi dan sosial melalui pinjaman PEN daerah, optimalisasi BUMD, kerjasama daerah, dan sumber pendanaan lainnya.
- Insentif atau relaksasi perpajakan, selain untuk tujuan memitigasi dampak Covid-19, hal ini memiliki tujuan agar daerah tetap mendapatkan kepastian penerimaan.

B. Bidang Kesehatan

- Sosialisasi dan edukasi perilaku hidup sehat secara berkala.
- Memperkuat kerjasama protokol kesehatan beserta penegakannya (pemerintah-swasta-masyarakat) dengan operasi rutin pada ruang publik (pasar, terminal, rumah makan, dsb).
- Optimalisasi penggunaan anggaran kesehatan dan peningkatan pinjaman PEN daerah untuk meningkatkan infrastruktur kesehatan sarana dan prasarana kesehatan.
- Pembentukan kampung tangguh untuk memperluas cakupan 3P (Pencegahan,

Penanganan, dan Pengendalian pandemi Covid-19) pada masyarakat di daerah.

C. Bidang Ekonomi

- Optimalisasi pemulihan ekonomi melalui pelaksanaan kebijakan *new normal* dengan tetap memperketat protokol kesehatan di masyarakat.
- Digitalisasi di aspek pembayaran dan pemasaran UMKM.
- Mengoptimalkan *potential winner sector* (penguatan industri berbasis lokal dan perdagangan).
- Optimalisasi bansos dalam rangka ketersediaan pangan dan peningkatan daya beli masyarakat.
- Fasilitasi dan optimalisasi pemulihan ekspor.
- Penguatan literasi dan inklusi keuangan.
- Implementasi penyaluran bantuan sosial yang diperketat dan diperjelas, terutama *jobdesk* dan insentif bagi penanggung jawab yang ditetapkan.
- Optimalisasi industrialisasi berbasis sumberdaya lokal untuk memperkuat perdagangan antar daerah.

D. Bidang Sosial

- Mempertegas implementasi sanksi pelanggaran protokol kesehatan.
- Koordinasi antar instansi/ lembaga secara rutin dalam rangka pengawasan pengendalian Covid-19.
- Pelayanan edukasi atas informasi seputar Covid-19 dan penyediaan internet publik.
- Perbaikan layanan ketenagakerjaan dan pelatihan.
- Peningkatan pelayanan dan perlindungan sosial melalui optimalisasi bantuan sosial

5. DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur. (2020). *Laporan Realisasi Anggaran Daerah dan Belanja Tidak Terduga*. Surabaya.
- Bardaka, Ioanna and Bournakis Ioannis. (2019). *Total Factor Productivity (TFP) and Fiscal Consolidation: How Harmful is austerity? Economic Modelling*.
- Brehm, Stefan. (2013). *Fiscal Incentives, Public Spending and Productivity Country-Level Evidence from a Chinese Province. World Development*. Vol. 46, pp. 92-103.
- Halim, Abdul. (2004). *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*, Edisi Revisi Kesatu. Yogyakarta : Penerbit UPP AMP YKPN.
- Halim, Abdul. (2008). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi Ketiga, Jakarta: Salemba Empat.
- Mahmudi. (2010). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Edisi Kedua. Penerbit UPP STIM YKPN, Yogyakarta.
- Mardiasmo. (2002) *Akuntansi Sektor Publik*. Andi Offset, Yogyakarta.
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk mempercepat penanganan pandemik Covid-19. 2020. Jakarta.
- Pak, Anton. dkk. (2020). *Economic Consequences of the Covid-19 Outbreak: The Need for Epidemic Preparedness*. *Front. Public Health* 8:24.
- Prasetyo, Ferry. (2012). *Modul Ekonomi Publik Bagian V: Teori Pengeluaran Pemerintah*. Universitas Brawijaya.
- Sabir, S dan Qamar, M. (2019). *Fiscal Policy, Institutions and Inclusive Growth: Evidence from the Developing Asian Countries. International Journal of Social Economics*. Vol. 46. Pp 822-837
- Sikhosana, Nqobile dan Ogochukwu Nzewi. (2019). *An Overview of Public Sector Budget Monitoring and Evaluating System for Gender Equality: Lessons from Uganda and Rwanda*.

Appendix

Tabel 1. Faktor Internal dan Eksternal Permasalahan Implementasi Kebijakan Alokasi Anggaran Covid-19

No	Aspek	Faktor Internal		Faktor Eksternal	
		<i>Strengths</i> (Kekuatan)	<i>Weaknesses</i> (Kelemahan)	<i>Opportunity</i> (Peluang)	<i>Threat</i> (Ancaman)
1.	Kebijakan	<ul style="list-style-type: none"> Peraturan daerah yang jelas dan terarah (landasan perundang-undangan) 			
2.	Anggaran	<ul style="list-style-type: none"> Kemandirian dan efektivitas pengelolaan pendapatan dan belanja daerah Realokasi dan <i>refocusing</i> anggaran berbasis <i>outcome</i>: Belanja Tidak Terduga (BTT) pada bidang kesehatan, ekonomi, dan sosial 	<ul style="list-style-type: none"> Pergeseran <i>mandatory spending</i> melalui prosedur dan proses penyesuaian APBD tahun 2020 relatif singkat 	<ul style="list-style-type: none"> Pemanfaatan dan pengelolaan <i>creative financing</i> dengan pinjaman daerah (pinjaman PEN daerah) dan kerjasama daerah 	<ul style="list-style-type: none"> Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Transfer menurun (penurunan APBD)
3.	Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Penegakan Protokol Kesehatan <i>Refocusing</i> anggaran kesehatan 2,69 persen dari APBD untuk penanganan Covid-19 	<ul style="list-style-type: none"> Ketidaksiplinan masyarakat atas protokol kesehatan Rasio kecukupan tempat tidur isolasi pasien Covid-19 sebesar 49 persen (dibawah standar WHO, 60 persen) 	<ul style="list-style-type: none"> Peran RS swasta dan lab dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 	<ul style="list-style-type: none"> Kebijakan <i>New Normal</i> jika tidak diimbangi dengan kesiapan dan kedisiplinan semua pihak
4.	Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Kebijakan <i>New Normal</i> dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat <i>Refocusing</i> anggaran ekonomi 0,77 persen dari APBD untuk penanganan Covid-19 	<ul style="list-style-type: none"> <i>Potential loser sectors</i>: pariwisata & UMKM 	<ul style="list-style-type: none"> Pemanfaatan <i>Potential Winner Sector</i> Kerjasama antar pihak (pemerintah, swasta dan masyarakat) 	<ul style="list-style-type: none"> Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) lanjutan Pertumbuhan ekonomi menurun, ketimpangan & kemiskinan meningkat
5.	Sosial	<ul style="list-style-type: none"> Jaring Pengaman Sosial (<i>Social Safety Net</i>) <i>Refocusing</i> anggaran sosial 3,33 persen dari APBD untuk 	<ul style="list-style-type: none"> Konektivitas dan integrasi dalam pembatasan sosial masih rendah 	<ul style="list-style-type: none"> Kebijakan <i>New Normal</i> dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat 	<ul style="list-style-type: none"> Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) lanjutan

No	Aspek	Faktor Internal		Faktor Eksternal	
		Strengths (Kekuatan)	Weaknesses (Kelemahan)	Opportunity (Peluang)	Threat (Ancaman)
		penanganan Covid-19	<ul style="list-style-type: none"> • Media informasi publik masih kurang • Masih dijumpai diskriminasi dan kekerasan simbolik antar sesama 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan filantropi dalam pemberdayaan masyarakat 	

Tabel 2. Matriks Analisis SWOT Strategi Implementasi Kebijakan Alokasi Anggaran dan Percepatan Pemulihan Covid-19

		INTERNAL	
		Strength	Weakness
SWOT		<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan daerah yang jelas dan terarah (landasan perundang-undangan) • Kemandirian dan efektivitas pengelolaan pendapatan dan belanja daerah • Realokasi dan <i>refocusing</i> anggaran berbasis <i>outcome</i>: Belanja Tidak Terduga (BTT) pada bidang kesehatan (2,69 persen), ekonomi (0,77 persen), dan sosial (3,3 persen) • Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) • Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 • Penegakan Hukum Protokol Kesehatan • Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi • Kebijakan <i>New Normal</i> dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat • Jaring Pengaman Sosial (<i>Social Safety Net</i>) 	<ul style="list-style-type: none"> • Pergeseran <i>mandatory spending</i> melalui prosedur dan proses penyesuaian APBD tahun 2020 relatif singkat • Ketidaksiplinan masyarakat atas protokol kesehatan • Rasio kecukupan tempat tidur isolasi pasien Covid-19 sebesar 49 persen (dibawah standar WHO, 60 persen) • <i>Potential loser sectors</i>: pariwisata & UMKM • Konektivitas dan integrasi dalam pembatasan sosial masih rendah • Media informasi publik masih kurang • Masih dijumpai diskriminasi dan kekerasan simbolik antar sesama
EXTERNAL	Opportunity	<ul style="list-style-type: none"> • Pemanfaatan dan pengelolaan <i>creative financing</i> dengan pinjaman daerah (pinjaman PEN daerah) dan kerjasama daerah • Peran RS swasta dan lab dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 • Pemanfaatan <i>Potential Winner Sector</i> • Kerjasama antar pihak (pemerintah, swasta dan masyarakat) • Kebijakan <i>New Normal</i> dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat • Peningkatan filantropi dalam pemberdayaan masyarakat 	<p>STRATEGI S-O</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memperkuat kerjasama protokol kesehatan beserta penegakannya (pemerintah-swasta-masyarakat) • Optimalisasi sumber pendanaan melalui <i>creative financing</i> dan kerjasama daerah/ swasta dalam rangka peningkatan layanan kesehatan • Optimalisasi pemulihan ekonomi dan sosial melalui pelaksanaan kebijakan <i>New Normal</i> dengan protokol kesehatan ketat • Pemanfaatan media elektronifikasi dan digitalisasi dalam layanan berbasis <i>e-government</i> • Mengoptimalkan <i>potential winner sector</i> • <i>Spending better</i> dalam pemulihan kesehatan, ekonomi, dan sosial (<i>value for money</i> dan berbasis kinerja) <p>STRATEGI W-O</p> <ul style="list-style-type: none"> • Percepatan penyesuaian dan realisasi APBD tahun 2020 • Pengawasan mobilisasi barang dan penduduk dengan memperkuat penegakan protokol kesehatan • Peningkatan kuantitas dan kualitas sarpras kesehatan • Fokus pemulihan sektor pariwisata dan peningkatan digitalisasi UMKM • Sosialisasi dan edukasi pemahaman, penyebaran, dan protokol kesehatan Covid-19 • Menjgakomodir filantropi dalam rangka peningkatan pemberdayaan masyarakat terdampak • Peningkatan <i>updating</i> data sosial-ekonomi dan sarana dan prasarana internet publik

	<i>Threat</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Transfer menurun (penurunan APBD) • Kebijakan <i>New Normal</i> jika tidak diimbangi dengan kesiapan dan kedisiplinan semua pihak • Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) lanjutan • Pertumbuhan ekonomi menurun, ketimpangan, pengangguran dan kemiskinan meningkat 	<p style="text-align: center;">STRATEGI S-T</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mempertegas sanksi pelanggaran protokol kesehatan • Optimalisasi bansos dalam rangka ketersediaan pangan dan peningkatan daya beli masyarakat • Perbaiki layanan ketenagakerjaan dan pelatihan • Membuka destinasi wisata sesuai protokol kesehatan dan digitalisasi UMKM 	<p style="text-align: center;">STRATEGI W-T</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan layanan pemungutan PAD dan percepatan penyesuaian APBD 2020 • Meningkatkan kemandirian dan efektivitas pengelolaan pendapatan dan belanja daerah • Peningkatan perlindungan sosial melalui optimalisasi bansos • Meningkatkan sarpras di beberapa titik rawan (ruang publik)
--	---------------	---	---	--